

EVALUASI PROGRAM BANTUAN NELAYAN DI DESA SEBONG LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN

¹⁾DIAH SITI UTARI

²⁾RAJA ABUMANSHUR MATRIDI

³⁾ PUTRI SRI MULYANTI

^{1),2)} Dosen Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji

³⁾ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik

Email: ¹⁾utari08@gmail.com ; ²⁾abumanshur@gmail.com

Abstract

Currently, villages located in coastal areas, especially Sebong Lagoi Village, where most of the population work as fishing communities have the opportunity to develop because they are supported by government policies in issuing village funds, especially in the field of community empowerment, which has a budget of Rp. 686,500,000 (RKPDesa Sebong Lagoi). , 2019). One form of the work plan made by Sebong Lagoi Village is the fisherman assistance program. There are two types of fisherman assistance programs, namely capture fishermen and aquaculture fishermen. However, there are obstacles in the implementation of the fisherman assistance program, such as problems in submitting proposals.

The purpose of this study was to determine the fishermen's assistance program in Sebong Lagoi Village, Teluk Sebong District, Bintan Regency. This type of research is evaluative with a qualitative approach. The population of this study is according to Teluk Sebong Subdistrict in 2019 Figures, the entire community of Sebong Lagoi Village, amounting to 3,742 people, some of the people in Sebong Lagoi Village working as fishermen as many as 151 people, and the Sebong Lagoi Village Office totaling 13 people. The sampling technique used is purposive sampling. The data used in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is qualitative data analysis.

The results of this study are the Fisherman Assistance Program in Sebong Lagoi Village, Teluk Sebong District, Bintan Regency, which has been running but has not been maximized and has achieved the expected results. The advice that can be given is that the village government should make a village regulation or alternative policies related to the supervision of the assistance, so that the assistance can be managed properly.

Keywords: *Program Evaluation, Fishermen Assistance*

Abstrak

Saat ini desa-desa yang berada di wilayah pesisir khususnya Desa Sebong Lagoi yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai masyarakat nelayan memiliki kesempatan untuk berkembang dikarenakan didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan dana desa, khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat memiliki anggaran sebesar Rp 686.500.000 (RKPDesa Sebong Lagoi, 2019).Salah satu bentuk rencana kerja yang dibuat oleh Desa Sebong Lagoi

ialah program bantuan nelayan. Ada dua jenis program bantuan nelayan yaitu nelayan tangkap dan nelayan budi daya. Namun, ada kendala dalam pelaksanaan program bantuan nelayan tersebut, seperti masalah dalam mengajukan proposal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program bantuan nelayan di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Jenis penelitian ini adalah evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Adapun populasi penelitian ini adalah menurut Kecamatan Teluk Sebong Dalam Angka 2019 seluruh masyarakat Desa Sebong Lagoi yang berjumlah 3.742 jiwa, yang sebagian masyarakat di Desa Sebong Lagoi berprofesi sebagai nelayan sebanyak 151 orang, dan Kantor Desa Sebong Lagoi berjumlah 13 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu Purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu analisa data kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Program Bantuan Nelayan di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, sudah berjalan namun belum maksimal dan pencapaian hasil yang diharapkan. Saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya pemerintah desa membuat perdes atau alternative kebijakan terkait pengawasan terhadap bantuan tersebut, agar bantuan tersebut bisa dikelola dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi Program, Bantuan Nelayan

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2005). Kehidupan nelayan di wilayah pesisir Indonesia yang hidupnya bergantung pada hasil laut, menggunakan teknologi tradisional dalam pola mata pencahariannya. Selain alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/men/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa untuk lebih memberdayakan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan karena adanya penurunan kualitas hidup masyarakat, maka perlu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan salah satunya melalui bantuan alat tangkap. Bantuan langsung ini merupakan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan kepada masyarakat nelayan.

Saat ini desa-desa yang berada di wilayah pesisir khususnya Desa Sebong Lagoi yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai masyarakat nelayan

memiliki kesempatan untuk berkembang dikarenakan didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan dana desa. Dana desa tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang ditransfer ke desa yang melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota dan dipergunakan untuk pengeluaran penyelenggaraan, pelaksanaan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2019 Desa Sebong Lagoi memiliki dana desa sebesar Rp 968.399.000 yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat memiliki anggaran sebesar Rp 686.500.000 (RKPDesa Sebong Lagoi, 2019).Salah satu bentuk rencana kerja yang dibuat oleh Desa Sebong Lagoi ialah program bantuan nelayan.

Program tersebut telah berjalan selama 4 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Ada dua jenis program bantuan nelayan yaitu nelayan tangkap dan nelayan budi daya, program bantuan nelayan tersebut bersumber melalui dana desa, dengan disalurkan dana desa masyarakat bisa merasakan manfaatnya daan membantu masyarakat adanya bantuan khususnya bantuan nelayan.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian alat tangkap yang pada umumnya digunakan di komunitas nelayan tradisional seperti sampan, bubu, jaring, dan sebagiannya yang diperoleh untuk kelompok-kelompok nelayan yaitu nelayan tangkap dan nelayan budidaya.Dalam tiga tahun ini bantuan nelayan memberikan dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya, salah satunya ialah masalah dalam mengajukan proposal.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Provinsi Kepulauan Riau merupakan Kepulauan yang sebagian daerahnya pesisir dan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bintan dekat dengan pesisir berprofesi sebaga nelayan. Sehingga dengan adanya program bantuan nelayan ini memudahkan nelayan menangkap ikan dan mengurangi biaya operasional dengan demikian nelayan dapat meningkatkan produktifitasnya dan hasil tangkapannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program bantuan nelayan di Desa Sebong lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Menurut Anderson (Anggara, 2014;21) kebijakan publik adalah “suatu tindakan yang memiliki tujuan dan dilakukan sejumlah pelaku dan seorang pelaku agar mengatasi suatu masalah”. Sedangkan kebijakan publik menurut Wiliam N. Dunn (Pasolong, 2014;39) yaitu “suatu rangkaian pilihan yang berkaitan, di susun oleh pejabat ataupun lembaga pemerintah bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, seperti kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, pendidikan, kesehatan, energy, keamaan dan pertahanan”.

William and Dunn (Wirnaro, 2012;35) menyebutkan tahapan-tahapan kebijakan publik:

a. Tahap penyusunan agenda

Pelaku kebijakan dipilih serta di angkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali atau ada pula masalah.

b. Tahap formulasi kebijakan

Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternative atau pun pillihan kebijakan yang ada, dalam tahap ini masing-masing alternatif atau pilihan kebijakan yang ada dalam tahap ini masing-masing alternatif kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus atau direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah mampu memecahkan masalah.

2. Evaluasi Program

Menurut Winarno (2014;228-229) penilaian adalah tahap terakhir dalam proses kebijakan, pada tahap akhir tidak hanya melakukan kegiatan fungsional tetapi pada proses kebijakan publik dari perumusan masalah, program untuk menyelesaikan masalah, implementasi, sampai dampak kebijakan. Penilaian ini tujuannya melihat faktor apa yang menjadi kegagalan atau melihat kebijakan tersebut sudah menjadi yang diinginkan oleh dari itu penilaian tersebut terdapat isi kebijakan, penilaian kebijakan dan dampak kebijakan.

Lester dan Stewart (Winarno 2014;235) dalam mengevaluasi suatu program oleh seseorang evaluator tiga hal dapat dilakukan oleh seorang evaluator, misalnya pekerjaannya, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Kedua, evaluasi tentang kemampuan kebijakan untuk memperbaiki permasalahan sosial, seperti misalnya usaha mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas. Ketiga, evaluasi berkaitan dengan konsekuensi kebijakandalam bentuk feedback, termasuk didalamnya adalah reaksi dari tindakan pemerintah atau pernyataan sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuatan keputusan.

Selanjutnya untuk melakukan evaluasi kebijakan, harus melakukan beberapa tahapan. Menurut Suchman (Nugroho, 2014;734) mengemukakan tahapan evaluasi kebijakan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- 2) Analisis terhadap masalah.
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Arikunto (2010;45-48) menjelaskan evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stuffbeam dan Shinkfield adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Stuffbeam mengatakan hasil evaluasi akan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 huruf yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Context : latar belakang atau situasi yang mempengaruhi perencanaan program.
- b. Input : kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program.
- c. Proses : menjalankan program dan menggunakan fasilitas sesuai apa yang telah direncanakan.
- d. Product : hasil yang diperoleh dalam menjalankan program.

Stufflebeam merumuskan model evaluasi CIPP, yang membagi evaluasi menjadi 4 macam, (Wirawan, 2011: 92) :

- a. Context Evaluation to Serve Planning Decision
Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.
- b. Input Evaluation, Structuring Decision
Evaluasi ini menolong, mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
- c. Process Evaluation, to Serve Implementing Decision
Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauh mana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.
- d. Product Evaluation, to Serve Recycling Decision
Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?

Dengan demikian, maka evaluasi bisa disimpulkan yaitu suatu aksi atau kegiatan direncanakan agar mengetahui keadaan gambaran objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya yang telah dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk mendapatkan kesimpulan. William N. Dunn, dalam evaluasi kebijakan terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan Dunn (Subarsono;2013:126) sebagai berikut :

1. Efektifitas
Berkenaan dengan apakah program/kebijakan mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari di adakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
2. Efisiensi
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan
Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan.
5. Responsivitas
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan
Suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian yang dilakukan di Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk

Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun populasi penelitian ini adalah menurut Kecamatan Teluk Sebong Dalam Angka 2019 seluruh masyarakat Desa Sebong Lagoi yang berjumlah 3.742 jiwa, yang sebagian masyarakat di Desa Sebong Lagoi berprofesi sebagai nelayan sebanyak 151 orang, dan Kantor Desa Sebong Lagoi berjumlah 13 orang. Teknik sampel yang digunakan yaitu Purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Evaluasi Program Bantuan Nelayan di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong

1. Efektifitas

Dalam evaluasi terhadap efektifitas program bantuan nelayan ini, digunakan untuk menentukan standar mengenai tujuan yang hendak dicapai dan berkenaan dengan program tersebut apakah mampu meningkatkan hasil tangkapan oleh nelayan di Desa Sebong Lagoi.

- a. Efektivitas adanya dampak positif dan negatif setelah melaksanakan program bantuan nelayan.

Hasil temuan peneliti untuk adanya dampak positif dan negatif setelah melaksanakan program bantuan nelayan belum bisa terlihat berdampak positif terhadap pencapaian produktifitas hasil tangkapan, untuk pencapaian target, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh seperti nelayan yang terbatas dengan ekonomi untuk mendapatkan bahan bakar lalu dilihat dari faktor cuaca yang mana terhalangnya nelayan untuk melakukan aktifitas melaut.

- b. Adanya peningkatan produksi setelah mendapatkan program bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pendapatan produksi nelayan dilaut masih tergolong rendah dikarenakan pendapatan nelayan tidak sesuai dengan yang diharapkan, nelayan masih bergantung dengan musim cuaca untuk melaut.

c. Komitmen kelompok nelayan

Masyarakat nelayan di Desa Sebong Lagoi memiliki kelompok nelayan yang memiliki budaya yang dianut masyarakat nelayan secara turun temurun tetapi juga bertujuan untuk saling membantu dan peduli dimasa sulit.

2. Efisiensi

Dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak masyarakat nelayan, diketahui bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak desa, dalam bentuk barang seperti alat-alat sudah lebih bagus dibandingkan dengan alat-alat yang sebelumnya mereka gunakan. Hal ini diberikan langsung berupa barang agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

3. Kecukupan

Dalam target meningkatkan produksi tangkapan, masih belum tercapai, karena adanya kendala dari masing-masing nelayan, masih ada nelayan yang tidak memiliki sampan atau armada untuk melaut sedangkan untuk mendapatkan tangkapan yang banyak harus menempuh jarak mulai dari 1 sampai 5 mil. Masyarakat nelayan juga ada yang memiliki kendala lainnya seperti kondisi sampan yang sudah rusak dan tidak bisa memperbaiki sampan tersebut dikarenakan kendala biaya. Maka tentu saja bisa mengakibatkan masyarakat nelayan tidak bisa melakukan aktifitas melaut, sehingga pendapatan produksi pun menurun.

Saat ini pihak desa belum bisa memberikn solusi mengenai permasalahan ini. Untuk melihat kecukupan ini sangat diharapkan adanya alternatif kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan

armada untuk melaut. Dengan adanya kebijakan maka bisa meringankan beban masyarakat agar bisa melaut dan tidak terkendala dengan armada.

4. Pemerataan

Kebijakan pada pemerataan yaitu berupa upaya penyaluran bantuan yang diwujudkan dalam pemberian pelayanan pemberian bantuan secara merata dan seimbang kepada seluruh masyarakat nelayan sebong lagoi. Hal ini dapat dilihat dari pendistribusian atau penyaluran bantuan nelayan di Desa Sebong Lagoi harus merata kepada masyarakat nelayan yang benar-benar membutuhkan bantuan, baik itu masyarakat yang belum sama sekali mendapatkan bantuan ataupun masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bantuan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa masih ada beberapa nelayan yang tidak memiliki sarana dan prasarana, ataupun alat tangkap yang tidak layak di pakai lagi dan masyarakat nelayan yang belum sama sekali merasakan bantuan program nelayan tersebut, namun mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah nelayan penerima bantuan yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu hanya 10 orang (1 proposal).

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan kebijakan dapat di artikan sebagai respons pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap implementasi, respon terhadap implementasi setelah memperediksi dampak dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan respon masyarakat dapat dirasakan pada dampak kebijakan tersebut. Bentuk dukungan positif dan bentuk penolakan negatif.

a. Tanggapan masyarakat nelayan setelah menerima bantuan nelayan.

Program bantuan nelayan bisa dikatakan berhasil jika tanggapan dari masyarakat nelayan terhadap kebijakan tersebut baik. Tetapi jika

masyarakat nelayan belum merasakan pemenuhan kebutuhan maka program tersebut bisa menjadi penilaian yang kurang baik.

Masyarakat nelayan sangat mendukung adanya program bantuan nelayan yang telah dilaksanakan oleh pihak desa, namun masyarakat menginginkan perhatian yang lebih agar program bantuan ini bisa berjalan setiap tahunnya untuk masyarakat nelayan yang membutuhkan. Selain itu mengenai pengawasan setelah mendapatkan bantuan juga harus lebih efektif, agar bantuan yang diberikan bisa dirawat dengan sebaik mungkin dan digunakan dalam jangka panjang. Karena masih banyak permasalahan mengenai perawatan bantuan yang sudah diberikan.

b. Tanggapan pihak kantor Desa dan Masyarakat nelayan terhadap pengawasan pemberian bantuan.

Untuk program bantuan ini, pihak desa sudah menugaskan 1 sampai 2 orang untuk mengawasi setelah bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuannya. Pengawasan dilakukan 1 sampai 3 kali untuk memaksimalkan bantuan tersebut dan apakah sudah tepat digunakan oleh masyarakat nelayan yang menjadi penerima. Masyarakat nelayan sangat berharap agar program bantuan nelayan bisa terus berjalan kedepannya.

6. Ketepatan

Salah satu hal yang berkaitan dengan ketepatan adalah ketepatan terhadap sasaran apakah program bantuan nelayan ini memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat nelayan.

Hasil obeservasi yang peneliti dapat jabarkan yakni dimulai dari ketepatan waktu dalam pemberian bantuan dan kesesuaian atau spesifikasi bantuan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan sudah sesuai.

a. Ketepatan waktu dalam pemberian bantuan.

Untuk indikator ketepatan waktu dalam pemberian bantuan dilihat dari berapa lamanya masyarakat nelayan mendapatkan bantuan tersebut setelah mengajukan proposal. Hasil penelitian untuk indikator waktu berkenaan dengan lamanya proses penyaluran dana, masih belum baik. Hal tersebut membuat masyarakat nelayan mengeluh atas keterlambatan penyaluran bantuan, selain itu ada yang sudah menunggu lama tetapi bantuan tersebut tidak dikeluarkan.

b. Kesesuaian atau spesifikasi bantuan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan sudah sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa program bantuan nelayan sudah dikatakan tepat untuk terus dijalankan, karena dari tujuan program bernilai dan dapat berguna untuk membantu perekonomian masyarakat nelayan. Dengan adanya bantuan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat nelayan yang sudah menerima bantuan tersebut. Bantuan tersebut diberikan langsung yang berupa barang, dilihat dari spesifikasi barang yang diberikan kepada masyarakat nelayan sudah sesuai dan tepat dengan apa yang mereka butuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data dengan wawancara kepada informan, observasi di lapangan, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Program Bantuan Nelayan di Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan, sudah berjalan namun belum maksimal dan pencapaian hasil yang diharapkan. Masih adanya beberapa kendala bagi nelayan untuk melaut seperti nelayan masih bergantung dengan musim cuaca untuk melaut. Selain itu juga belum semua masyarakat nelayan merasakan manfaat bantuan pemerintah tersebut, dikarenakan jumlah nelayan penerima bantuan yang sangat terbatas, sehingga untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan secara keseluruhan masih belum tercapai, bahkan ada juga nelayan yang sudah menunggu lama untuk mendapatkan bantuan tersebut, ternyata bantuan tidak dikeluarkan. Selain itu juga

sampun dan alat tangkap ikan yang sudah diberikan oleh pemerintah tidak dirawat dengan baik oleh nelayan, sehingga mudah rusak.

SARAN

Seharusnya pemerintah desa membuat perdes atau kebijakan terkait penambahan jumlah kuota nelayan yang akan mendapatkan bantuan. Begitu juga pengawasan terhadap bantuan tersebut, agar bantuan tersebut bisa dikelola dengan baik, dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama (panjang).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bolkiah, A. S., Ilham, M., & Indrayani, E. (2021). *Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur*. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 363-374.
- Jumiati, I. E. (2019). *Analisis Evaluasi Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (Ppn) Karangantu Kota Serang*. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 2(1).
- Nugroho, D. Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- RINAH, S. A., & Utari, D. S. (2021). *Evaluasi Program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) Di Kota Tanjungpinang*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 500-513.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Wirnarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

.....(2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen:

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Sebong Lagoi Tahun 2019